

SKRIPSI



**PERSPEKTIF HAK KOMUNAL PADA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
NOMOR 9 TAHUN 2015 TERHADAP
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
NOMOR 5 TAHUN 1960**

OLEH :

MAIPA DEAPATI SISWADI

B111 12 107

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

HALAMAN JUDUL
PERSPEKTIF HAK KOMUNAL PADA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
NOMOR 9 TAHUN 2015 TERHADAP
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
NOMOR 5 TAHUN 1960

OLEH:
MAIPA DEAPATI SISWADI
B 111 12 107

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Keperdataan
Program studi ilmu hukum

OLEH:
MAIPA DEAPATI SISWADI
B 111 12 107

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSPEKTIF HAK KOMUNAL PADA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960

Disusun dan Diajukan Oleh

MAIPA DEAPATI SISWADI

B111 12 107

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 1 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof.Dr.A Suryaman. MP., S.H., MHum
NIP. 19690727 1999802 2 001

Sekretaris

Dr. Sri Susyanti Nur., S.H., M.H
NIP. 19641123 1990002 2 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof.Dr. Ahamdi Miru, S.H, M.H
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

NAMA : MAIPA DEAPATI SISWADI

No.Pokok : B 111 12 107

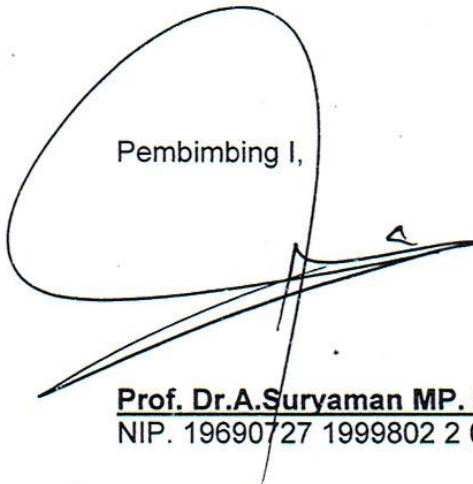
BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL : PERSPEKTIF HAK KOMUNAL PADA PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK
AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Mei 2015

Pembimbing I,



Prof. Dr.A.Suryaman MP. S.H., M.Hum
NIP. 19690727 1999802 2 001

Pembimbing II,



Dr. Sri Susyanti Nur. SH.,M.H
NIP. 19641123 199002 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MAIPA DEAPATI SISWADI
No. Pokok : B111 12 107
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perspektif Hak Komunal Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Maipa Deapati Siswadi, Nomor Induk Mahasiswa B111 12 107 Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “PERSPEKTIF HAK KOMUNAL PADA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA” yang dibimbing oleh Suryaman Mustari Pide selaku pembimbing I dan Sri Susyanti Nur sebagai pembimbing II.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Sudut Pandang hak Komunal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 dan mengetahui Implikasi Pencabutan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 1999 ke Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015.

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPN Provinsi Suksel, Kantor BPN Tana Toraja, Kantor BPN Bulukumba, Petua Adat dan Komunitas AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen-dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PERMEN ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 bahwa hak komunal pengaturannya lebih kompleks dan menyadari akan pentingnya pengakuan hak individu dan hak bersama atau kolektif. Hak komunal dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 tidak menafikkan eksistensi hak ulayat yang sejak dahulu menjadi panduan bagi masyarakat hukum adat untuk mengatur hal-hal yang ada dalam suatu masyarakat karena hak ulayat jelas dalam UUD 1945 dan UUPA. Sedangkan Impilkasi pencabutan PERMEN ATR/BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang hak ulayat menjadikan eksistensi Hak Ulayat saat ini masih tetap diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat walaupun PERMEN ATR/BPN terbaru tentang hak komunal dikeluarkan untuk menggantikan PERMEN ATR/BPN yang sebelumnya.

ABSTRACT

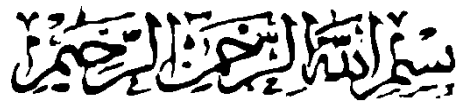
Maipa Deapati Siswadi (B111 12 107), “Perspective of Communal Rights on Regulation of Minister of Agrarian and Spatial No.5 of 1960 Concerning The Basis of Agraria”. Supervised by Suryaman Mustari Pide as the first supervisor and Sri Susyanti Nur second supervisor.

This research is aimed to understand the viewpoint of communal rights on Regulation of Minister of Agrarian and Spatial No.5 of 1960 and to understand the implication of the removal of Regulation of Minister of Agrarian and Spatial No.5 of 1999 and the establishment of on Regulation of Minister of Agrarian and Spatial No.9 of 2015.

This research took place in the National Land Agency (BPN) office of South Sulawesi, BPN office of Tana Toraja, BPN office of Bulukumba, Elders and AMAN Community (Alliance of Nusantara Indigenous People). This research was using interview and research to related documents as the data collecting technique.

The research shows that Regulation of Minister of Agrarian and Spatial No.9 of 2015 indicated that the regulation of communal rights is more complex and realized the importance of recognition towards individual and collective rights. Regulation of Minister of Agrarian and Spatial No.9 of 2015 never deny the existence of communal rights that becoming the guide of indigenous people in order to regulate things in the indigenous community, because the communal rights has been explicitly mentioned in the 1945 Constitution and BAL. Meanwhile the implication of the removal of Regulation of Minister of Agrarian and Spatial No.5 of 1999 concerning communal rights enacts the existence of communal rights still being recognized in the indigenous community although the recent Regulation of Minister of Agrarian and Spatial has been issued to replace the previous one.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada **Ayahanda, Siswadi. S.H.,M.Si** dan **Ibunda Darnah Yusuf. S.Pd** yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat.

Terimakasih Kepada **Keluarga Besarku** yang memberikan semangat kepada Penulis yang selalu menemani disetiap saat. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada **Kakanda Nurdiansah., S.H, Saudara Wahyudi Kasrul, Dan Saudara Arham Aras** yang selalu memberikan bantuan yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama penyusunan skripsi hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasamu akan di nilai oleh Allah Swt dan semoga selalu mendapatkan ridho dari-Nya.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: **“PERSPEKTIF HAK KOMUNAL PADA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR TAHUN 1960”**

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. **Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. **Bapak Dr. Winnerr Sitorus, S.H., M.H., LLM** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan Jajarannya.
7. **Ibu Prof. Dr. Andi Suryaman Mustari Pide. S.H., M.Hum.** dan **Dr. Sri Susyanti Nur., S.H., M.H.** selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat berberkah.
8. **Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle. S.H., MH., Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., Bapak Muh. Ramli Rahim., S.H., M.H.** terima kasih atas kesedianya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari harapan.
9. **Ibu Prof. Dr. Andi Suryaman Mustari Pide., S.H., M.Hum** selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi akademik.
10. **Bapak/Ibu Dosen** yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu **Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Pidana,**

Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Masyarakat dan Pembangunan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

11. Terima Kasih Kepada **Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas bantuan dan keramahannya melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.
12. Terima Kasih Kepada **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. dan Perpustakaan Pusat Unhas.** Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis.
13. Terima Kasih kepada **Kantor BPN Sulsel, Kantor BPN Tana Toraja, Kantor BPN Bulukumba, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Petua Adat Tana Toraja dan Bulukumba** yang telah bersedia menjadi narasumber. Terima kasih atas wawasan dan ilmu pengetahuan yang diberikan.
14. Kepada Sahabat – Sahabatku **ZBELENK** Andi Kartika SH, Adri Inggil, Arini Pratiwi S.Ked, Nur Jannah, Nurkhaeri Zulkaidah, A.Irfa Hasyifah SE, Rani Dizkasari, A.Ayu Lestari, Bella Aulia, Wendy Nara, Fitrianingsih, Wulan Vuji, A.Shafira Ayu, Devi Virginia Terima Kasih Atas Kasih Sayang, Waktu yang Telah Dilewatkan Selama

Bertahun – Tahun Sekolah sampai Sarjana dan Dukungan yang diberikan Hingga Saat ini.

15. Terimakasih Kepada yang selalu setia menemani **My Partner in Crime** Nyoman Suarningrat SH dan Sahabat-sahabatku **Gazebo Sektor VI** Achaa, Andi Anggy SH, Aldy Hamzah, Andy Rezki Juliarno, Arham Aras, Arlin Joemka SH, Dian Martin, Dirga SH, Eko Setiawan SH, Kak Fatia, Febri Maulana, Firman Nasrullah, Heriansyah SH, Lisa, Nisrina Atikah, Nur Fajrin, Oji Tilameo, Rama Satria, Wahyudi Kasrul, Yoga Alexander.
16. Kepada Teman Seperjuangan Selama Saya Kuliah **PARAPARACU** A. Rizqy R, Adri Inggil, Afif Muhni SH, A. Syahrin, A. Kartika SH, Aning Riani, Avel Haezer, Azhima Maricar SH, Ekarini Septiani, Fauzan Zarkasi, Harry Prasetya, Hawa Salman SH, Musdalifah, Lutfhi Dhiaulwadji, Moch Ichwanul Reiza SH, Muh Fityatul Kahfi, Muh Akmal, Muh Fairuz, Muh Nur Fajrin, Muh Syaifullah, Tri Putri, Putri Nirina, Rama Satria, Sadly Bakry, Sheila Masyita SH, Ika Vebrianty Ramadhany SH. Terima Kasih Atas Waktu dan Kebersamaan yang Tidak Akan Pernah Tergantikan dan Terlupakan selama 3 Tahun ini, Dukungan, Doa, Semangat yang Tak hentinya. Terima Kasih Untuk Semuanya.
17. Rekan Bisnisku **NAVY HOUSE** Padassejati, Muh Rezki Nur, Akmal Hidayat, Edhy Gazali, Andi Kartika SH, Adri Inggil, Arini Pratiwi

S.Ked, A.Irfa Hasyifah SE. Terima Kasih Atas Bantuannya Selama ini Sehingga Beban dalam Menuntaskan Skripsi Penulis Teratasi.

18. Terima Kasih kepada **Asian Law Students' Association (ALSA)** dan **International Law Students Association (ILSA)**, sebagai organisasi tempat penulis untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, keluarga, yang selalu memberikan kehangatan dan kebahagiaan bagi penulis. Semoga ALSA semakin maju dan tetap ***Always Be One***. Semoga ILSA semakin maju karena ***Our Future Awaits***. Terima Kasih untuk **GARDA TIPIKOR** yang Telah Memberikan Banyak Pengetahuan Baru diluar Perkuliahan, dan Pengalaman yang Sangat Berharga.
19. Terima Kasih kepada Saudara lain Ibuku A.Fadila Jamila Irbar SH, dan Indira Saraswati, serta Saudara kembarku Feny Septi Arista SH *thanks for becoming place which let my hearts collide, my perfect salvation. Without you I'm still something but not as great when you guys here*.Terima kasih atas bantuannya.
20. **Teman-teman Angkatan 2012 (PETITUM) FH-UH**, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. Sukses selalu untuk kita semua.
21. **Teman-teman KKN Reguler Angkatan 90 Unhas**, khusus untuk Posko Desa Salobukkang Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap Dirga SH, Dika, Asrah SKM, dan Nina. Terima kasih atas kerja

samanya selama KKN. Semoga kita selalu bersama sebagai saudara dan ilmu kita dapat berberkah.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima oleh semua orang yang membutuhkannya.

Makassar, Juni 2016

Maipa Deapati Siswadi

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Persetujuan Penempuh Skripsi	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat	
1. Pengertian	10
2. Sumber Hukum Adat	13
3. Corak Hukum Adat	15
4. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional ..	19
5. Masyarakat Hukum Adat	22
B. Tanah Adat	
1. Kedudukan Tanah Adat dalam Hukum Adat ...	29
2. Hak-hak Atas Tanah dalam Hukum Adat	30
3. Hak Purba	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	
B. Jenis Penelitian	38

C. Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sudut Pandang Hak Komunal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015. . .	42
B. Implikasi Pencabutan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 1999 ke Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015. . . .	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini eksistensi Hukum adat merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam perbaikan hukum nasional di Indonesia. Di tengah carut-marut penegakan hukum nasional, hukum adat hadir sebagai landasan utama dalam menjaga keutuhan hukum nasional. Keistimewaan dan sifat hukum adat dapat mengikuti perkembangan zaman serta hukum yang hidup turun temurun dalam masyarakat yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat.

Eksistensi Hukum Adat di Indonesia dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Dalam pasal 18B ayat 2 UUD NKRI 1945 berbunyi

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”¹.

Berdasarkan Penjabaran dari ayat tersebut, perlindungan masyarakat hukum adat mensyaratkan pada dua hal yakni 1. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ada dan bertahan karena pengakuan dan penghormatan dari negara dengan catatan kesatuan tersebut masih

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hidup dan melangsungkan kehidupan, selaras dengan perkembangan masyarakat nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 2. Hak-hak tradisional kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat juga diakui.

Hukum Adat juga menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional yang berkaitan dengan Hukum tanah/Agraria. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) pasal 5 menyatakan:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”².

Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa pengaturan Hukum Agraria kita didasarkan pada hukum adat dengan syarat-syarat yang dirinci pula.

Landasan hukum pengakuan tentang Hukum Adat, masyarakat hukum adat dengan hak istimewa yang dimilikinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 dalam UUPA menyatakan bahwa

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Agraria*, Sinar Grafika. hlm 4

*boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi*³.

Dalam Pasal 3 UUPA tersebut melegitimasi masyarakat hukum adat yang pada hakekatnya juga berarti mengakui hak atas tanah dan hak hak lainnya. Hak atas tanah dalam masyarakat hukum adat yang dimaksud di sini adalah hak persekutuan atas tanah yang merupakan penguasaan bersama atas tanah dengan maksud untuk memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak atas tanah inilah yang dalam masyarakat disebut “Hak Ulayat”. Van Vollenhoven menyebut hak ulayat dengan istilah “*beschikking*” sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “*beschikkingskring*”. Para ahli hukum adat Indonesia mempergunakan berbagai istilah, seperti misalnya; hak purba (Djodjodigono di catatan kaki), hak pertuanan (Soepomo), hak bersama (Hazairin)⁴.

Menurut Effendi Parangin hak ulayat ialah suatu rangkaian daripada wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya⁵. Sedangkan menurut Hooker, hak ulayat pada dasarnya lebih menyangkut masalah hubungan antara masyarakat serta pribadi-pribadi sebagai warga masyarakat dengan tanahnya. Hal pokok yang menjadi dasar untuk dapat menjelaskan hal tersebut ditinjau

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, hlm 175

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm 218

sebagai suatu totalitas, kesatuan publik maupun badan hukum. Sebagai suatu totalitas misalnya, masyarakat hukum adat merupakan penjumlahan dari warga-warganya termasuk pula pemimpinnya atau kepala adatnya. Sebagai suatu kesatuan publik, masyarakat hukum adat sebenarnya merupakan suatu badan penguasa yang mempunyai hak untuk menertibkan masyarakat serta mengambil tindakan-tindakan tertentu terhadap warga masyarakatnya. Sebagai badan hukum, masyarakat hukum adat diwakili oleh kepala adatnya dan lebih banyak bergerak dibidang hukum perdata. Dengan demikian sebenarnya hubungan masyarakat hukum adat dengan tanahnya merupakan suatu hubungan publik maupun hubungan perdata oleh masyarakat hukum adat menguasai dan memiliki tanah tersebut⁶.

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya adalah sebagai suatu totalitas. Masyarakat hukum adat menerapkan hak ulayat dengan cara menikmati atau memungut hasil tanah, maka masyarakat hukum adat membatasi kebebasan masyarakat untuk memungut hasil tanah tersebut. Hak ulayat dan hak-hak warga masyarakat secara pribadi, mempunyai hubungan timbal balik yang bertujuan untuk mempertahankan keserasian sesuai dengan kepentingan masyarakat dan warga-warganya⁷.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

⁶ Soerjono Soekanto, *op cit.*, hlm 174

⁷ *Ibid.*, hlm 174

(Permen ATR/BPN) Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal 1 menyatakan bahwa

“ Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi keberlangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”⁸.

Isi pasal tersebut sejalan dengan penjelasan para pakar tentang hubungan masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang ada padanya. Dibagian pasal lain Peraturan Menteri ATR/BPN tersebut diatas ini juga memberikan wewenang kepada setiap kesatuan masyarakat hukum adat dalam hal pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui dilakukan berdasarkan hukum adat setempat. Dengan banyaknya kesatuan masyarakat hukum adat dan beragam corak yang dimilikinya maka tepatlah kiranya maksud pasal tersebut memberikan wewenang pelaksanaan hak ulayat berdasarkan adat masing-masing sehingga pemerintah tidak terlalu jauh mengatur sendi kehidupan masyarakat hukum adat karena sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan karena sifat dan kekhususan haknya tersebut.

Peraturan Menteri ATR/BPN tersebut sebenarnya semakin menguatkan keberadaan hak ulayat namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata

⁸ Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, maka secara otomatis Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Hak ulayat dicabut atau tidak berlaku lagi (Pasal 18 Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2015).

Peraturan Menteri ATR/BPN terbaru ini memunculkan istilah baru yang disebut Hak komunal. Hak Komunal mengatur tentang kepemilikan bersama atas tanah yang kemudian didaftarkan untuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dalam rangka kepastian hukum dan mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Menteri ART/BPN yang terbaru tersebut selain mengatur tentang hak komunal atas tanah oleh masyarakat hukum adat juga mengatur tentang hak milik penguasaan atas tanah diberikan kepada masyarakat pada kawasan hutan atau perkebunan. Hadirnya Peraturan Menteri ART/BPN tersebut tentunya merupakan itikad baik oleh pemerintah dalam menjamin terciptanya kepastian hukum terhadap setiap penguasaan hak atas tanah.

Namun hal tersebut rupanya menimbulkan beberapa masalah yang mengancam hajat hidup orang banyak dan lingkungannya serta masyarakat hukum adat itu sendiri. Misalnya; hak milik penguasaan atas tanah diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dan atau perkebunan dengan berbagai syarat yang menurut penulis akan mengancam keberadaan dan kelestarian kawasan hutan atau perkebunan

karena perlahan akan terbagi-bagi menjadi hak milik perorangan dan dapat diusahakan sendiri baik dalam bentuk koperasi, kemitraan, unit bagian dari desa atau kelompok masyarakat dalam bentuk lainnya dan tentunya hal tersebut sangat disesalkan ditengah usaha semua kalangan menjaga hutan dan perkebunan untuk kepentingan masyarakat luas dan nasional yang sebenarnya dalam peraturannya kepemilikan haknya dalam bentuk hak guna usaha kemudian beralih menjadi hak milik.

Kemudian masalah lain menurut penulis ialah dalam konsideran pertimbangan poin B Peraturan Menteri ATR/BPN yang terbaru tersebut rupanya cacat formil dan materil karena hak komunal tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam UUPA pasal 3 sedangkan Peraturan Menteri ATR/BPN tersebut menggunakan pertimbangan UUPA pasal 3. Dalam berbagai peraturan dan referensi hukum, hak komunal juga tidak pernah disebutkan secara gamblang. Selain itu, Peraturan Menteri ATR/BPN yang terbaru ini juga memungkinkan pengaturan tentang pelaksanaan hak ulayat tidak ada lagi payung hukumnya bersamaan dengan dicabutnya Peraturan Menteri ATR/BPN yang lama tentang hak ulayat.

Dari berbagai masalah tersebut diatas kemudian penulis melakukan penelitian skripsi tentang Perspektif Hak Komunal Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pada Kawasan Tertentu Terhadap Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria/UUPA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sudut Pandang hak Komunal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015?
2. Bagaimana Implikasi Pencabutan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 1999 ke Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sudut Pandang hak Komunal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015
2. Untuk mengetahui Implikasi Pencabutan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 1999 ke Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut diatas, Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian yaitu dapat menjadi bacaan pembanding bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam pengetahuan mengenai Peraturan Ruang terbaru yaitu mengenai Hak Komunal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pengertian

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat⁹. C Snouchk Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah “adat recht” yaitu adat-adat, yang mempunyai sangsi-sangsi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan atau pendirian-pendirian yang tidak membayangkan arti hukum¹⁰. Istilah ini kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia)¹¹. Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)¹².

Ter Haar dan Scholten mengatakan bahwa peradilan menurut hukum adat adalah¹³:

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju Bandung, 2003. hlm 1

¹⁰ Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. CV. Rajawali, Jakarta, hlm 37

¹¹ Suryaman Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat dulu, kini, dan akan datang*, PT. Pelita Pustaka, Makassar hlm 3

¹² C. Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm 3

¹³ Bushar Muhammad., *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta., hlm 89

1. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat;
2. Jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa/jika ketetapan dari waktu lampau ada, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, hakim menurut keyakinan wajib memberikan putusan yang akan berlaku sebagai hukum didalam daerah hukumnya.

Adat juga diperkenalkan dikalangan banyak orang yang hanya terdengar kata “adat” saja. Kata adat ini sbenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang diberikan oleh Tuhan akal dan perilaku¹⁴.

Adat merupakan kepribadian suatu kepribadian bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsayang bersangkutan dari abad ke-abad. Tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri dimana antara satu dan yang lain tidaklah sama. Oleh karena itulah ketidaksamaan inilah yang menyebabkan adat tersebut merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri adat yang dimiliki oleh suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiannya¹⁵.

Dalam arti sempit sehari-hari yang dinamakan hukum adat ialah hukum asli yang tidak tertulis yang memberikan pedoman kepada

¹⁴ Suryaman Mustari Pide,. *Op. cit*, hlm 5

¹⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indoneisa (Dalam Kajian Pustaka)*, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung, hlm 1

sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya baik dari desa maupun yang dari kota.

Menurut Soepomo, Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku individu atau manusia Indonesia dalam hubungan satu dengan yang lainnya, baik itu keseluruhan kelaziman, kebiasaan, kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankannya oleh anggota-anggota masyarakat itu, juga keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atau pelanggaran dan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguat adat¹⁶.

Menurut Soerjono Soekanto Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtsvordigeordening der samenlebing*"¹⁷.

Menurut kesimpulan hasil "Seminar Hukum Adat dan Pengembangan Hukum Nasional", hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama¹⁸.

¹⁶ www.pengertian.pakar.com/2015/02/pengertian-hukum-adat-dan-sistem-hukum.html. diakses pada tanggal 13 november 2015, pukul 19.51 wita

¹⁷ C. Dewi Wulansari, *Op cit*, hlm 6

¹⁸ *Ibid*, hlm 6

2. Sumber Hukum Adat

Dalam membicarakan sumber hukum adat dianggap penting terlebih dahulu membedakan atas dua pengertian sumber hukum yaitu Welborn dan Kenbron. Sumber hukum adat dalam arti Welborn adalah tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Dengan perkataan lain Welborn itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan Kenbron adalah sumber hukum adat yang dapat diketahui dan dapat dikemukakan. Dengan lain perkataan sumber dimana asas-asas hukum adat menempatkan dirinya dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui¹⁹.

Sumber Hukum Tanah Adat terbagi atas 2 jenis, yaitu²⁰

a. Hukum Tanah Adat Masa Lampau

Hukum tanah adat masa lampau ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Serta pada zaman Indonesia merdeka pada tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi, hanya pengakuan. Adapun ciri-ciri hukum tanah adat masa lampau adalah sebagai berikut.

¹⁹ www.http.hukum-dan-umum.blogspot.co.id/2012/04/makalah-sumber-dan-asas-hukum-adat.html.

diakses pada tanggal 13 november 2015. Pukul 20.42 wita

²⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika 2007. hlm 8

Ciri-ciri tanah adat masa lampau adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun temurun masih berada di lokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan, dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah yang ada di negara Republik Indonesia.

b. Hukum Tanah Adat Masa Kini

Hukum tanah adat masa kini ialah hak memiliki menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti autentik berupa girik, petuk pajak, pipil, hak *agrarische eigendom*, milik yasan, hak atas druwe, atau hak atas druwe desa, pesini, Grant Sultan, hak usaha atas tanah bekas, fatwa ahli waris, akta peralihan hak, dan surat segel di bawah tangan, bahkan ada yang memperoleh sertifikatnya serta surat pajak hasil bumi, dan hak lainnya sesuai dengan daerah berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal.

3. Corak Hukum Adat

Suatu sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian di mana antar abagian satu dengan bagian yang lainnya saling bertautan atau berhubungan. Tiap hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat itu sendiri²¹.

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu²²:

a. Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat Batak yang menarik garis keturunannya dari laki-laki sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku dan dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga dewasa ini.

b. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan

²¹ I Gede A.B Wiranata., *Hukum Adat Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.Hlm 57

²² C. Dewi Wulansari, *Op. cit.*, hlm 15.

kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan Indonesia bahwa dialam semesta ini benda-benda berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme), disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan sebgainya) dan alam sejagad ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta. Corak keagamaan dalam hukum adat ini terlihat pula dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang berbunyi: “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan denagn didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

c. Kebersamaan (Bercorak Komunal)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Bahkan corak dan sifat kebersamaan ini terangkat pula dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

d. Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini jelas, nyatanya, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak berbunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat “terang dan tunai”, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengarkan orang lain, dan nampak terjadi “ijab kabul” (serah terima)-nya misalnya dalam jual beli, waktunya jatuh bersamaan antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya. Jika barang diterima pembeli tetapi harga belum dibayar, maka itu bukan jual beli tetapi hutang-piutang.

e. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Keterbukaan ini misalnya, dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu dalam hukum perkawinan adat yang disebut “*kawin anggau*”. Jika suami wafat maka isteri kawin dengan saudara suami. Kesederhanaannya misalnya dapat dilihat dari transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat-menyerat misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, cukup dengan adanya kesepakatan dua pihak secara lisan tanpa surat menyerat dari kepala desa dan sebagainya.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu, maka dapatlah dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan, menebal dan menipis. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.

g. Tidak dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Walaupun demikian adanya, juga dikenal hukum adat yang dicatat dalam aksara daerah yang bentuknya tertulis seperti di Tapanuli "*Ruhut Parsaoron di Hobatohan*" dan "*Patik Dohot Uhum ni Halak Batak*". Di Bali dan Lombok "*Awig-awig*", di Jawa "*Paranata Desa*" di Surakarta dan Yogyakarta "*Angger-angger*", di Aceh "*Sarakata*". Selain itu masih ada peraturan-peraturan hukum adat pada abad XV sampai XVIII yang tertulis dalam buku (manuskrip) orang-orang di Sulawesi Selatan yang disebut "*Lontara*" yang masih berlaku hingga sekarang. Jadi berbeda dengan Hukum Barat (Eropa) yang corak

hukumnya di kodifikasi/disusun secara teratur dalam kitab yang disebut dengan kitab perundangan.

h. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggan mulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya, diutamakan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, engan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung itu dibawa atau di disampaikan ke pengadilan negara. Corak musyawarah dan mufakat ini dalm penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai “penengah” perkara dan semangat dari majelis permusyawaratan adat. Peribahasa Lampung dalam bermufakata terungkap dalam kata “*mak patoh lamen lemah mak pegat dalam kendur*” (takkan patuh jika lemah, takkan putus jika kendur).

4. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Hukum Agraria Nasional yang telah berhasil diwujudkan oleh Undang-undang pokok Agraria menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi yang sentral di dalam sistem hukum agraria nasional. Hal ini demikian secara konkret akan banyak timbul kesulitan dalam menentukan bagaimana tempat

hukum adat yang dikatakan sebagai dasar daripada hukum agraria nasional²³.

Hukum adat bilamana dinyatakan sebagai dasar berpijak bagi hukum agraria yang baru berarti bahwa setiap masalah mengenai agraria maka aturan-aturan Hukum Adatlah yang dipergunakan sebagai ukuran dan sandaran untuk menetapkan suatu keputusan. Bilamana demikian halnya, maka tidaklah ada suatu yang diabaikan daripada isi ketentuan-ketentuan hukum adat mengenai masalah Agraria. Tidaklah ada suatu aturan hukum adat yang dikesampingkan. Penyampingan suatu hukum adat berdasarkan kepada alasan bahwa hukum itu tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pembinaan hukum adat menjadi bertentangan dengan pendirian bahwa hukum adat sebagai dasar berpijak hukum agraria baru²⁴.

Menurut Notonagoro, faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan Hukum Agraria Nasional adalah faktor formal dan faktor materil, faktor ideal, faktor agraria modern, dan faktor agraria politik. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut²⁵:

1. Faktor Formal

Keadaan Hukum Agraria di Indonesia sebelum diundangkannya UUPA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku

²³ H. Abdurrahman, *Kedudukan HUKUM ADAT dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, hlm 39

²⁴ *Ibid.*, hlm.51

²⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, 2008. Hlm 43

ini berdasarkan pada peraturan peralihan yang terdapat pada pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang semuanya itu bersama-sama menentukan dalam garis besarnya bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada zaman Hindia Belanda memegang kekuasaan, masih berlaku untuk sementara.

2. Faktor Material

Hukum Agraria Kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Dualisme hukum ini dapat meliputi hukum, subjek hukum maupun objeknya. Menurut hukumnya, yaitu satu pihak berlaku Hukum Agraria Barat yang diatur dalam KUH Perdata maupun Agrarische Wet, di pihak lain berlaku Hukum Agraria adat yang diatur dalam Hukum Adat tentang tanah masing-masing. Menurut subjeknya, Hukum Agraria Barat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat, di pihak lain Hukum Agraria adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat.

3. Faktor Ideal

Dari faktor ideal (tujuan negara), sudah tentu tujuan Hukum Agraria Kolonial tidak cocok dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan

tujuan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

4. Faktor Agraria Modern

Faktor Agraria Modern terletak dalam lapangan-lapangan:

- a. Lapangan Sosial
- b. Lapangan Ekonomi
- c. Lapangan Etika
- d. Lapangan Ideil Fundamental

5. Faktor Ideologi Politik

Indonesia sebagai bangsa dan negara mempunyai keterkaitan hidup dengan negara-negara lain. Indonesia tidak dapat mempunyai kedudukan tersendiri terlepas dari keadaan dan hubungan dengan negara-negara lain.

6. Masyarakat Hukum Adat

1. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Pasal 67 ayat 1 menyatakan bahwa:

“masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;*
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan*
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.*

Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor Genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah). Berdasarkan kedua faktor tersebut, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut²⁶:

1) Persekutuan Hukum Genealogis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia-Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam 3 macam sifat yaitu:

a. Masyarakat yang patrilineal

Pada masyarakat yang patrilineal ini susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan dari Bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan Ibu di singkirkan.

b. Masyarakat Matrilineal

Pada Masyarakat yang matrilineal, dimana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan Ibu (garis perempuan) dan garis keturunan Bapak disingkirkan.

c. Masyarakat yang bilateral atau parental

²⁶ C. Dewi Wulansari, *Op. cit*, hlm 25

Pada masyarakat yang bilateral atau parental, susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu Bapak dan Ibu bersama-sama sekaligus.

2) Persekutuan Hukum Teritorial

Masyarakat Hukum Territorial menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat di zaman Hindia-Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi, sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Menurut Van Dijk persatuan hukum teritorial itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu “persekutuan desa”, “persekutuan daerah” atau “perserikatan desa”²⁷.

Mengenai persekutuan hukum teritorial yang dimaksudkan diatas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut R. Van Dijk (1954) persekutuan hukum teritorial ini dibedakan ke dalam tiga macam yaitu²⁸:

- a. Persekutuan Desa (drop)
- b. Persekutuan Daerah
- c. Persekutuan dari beberapa Desa

²⁷ Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, *Dasar-dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka 2009. hlm 50

²⁸ C. Dewi Wulansari, *Op. cit*, hlm 25

Menurut Undang-undang pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 tentang Desa dikatakan sebagai berikut:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan ‘masyarakat hukum’, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa”.

3) Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum diatas.

Persekutuan hukum genealogis dan teritorial dasar pengingat utama anggota kelompoknya adalah dasra persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotany bukan saja terikat pada tempat kediamana daerah terttentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan. Dalam suatu daerah dimana terdapat masyarakat yang teritorial genealogis, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintah berdasarkan perundang-undangan hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antara adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran.

1. Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam sembilan belas lingkungan hukum adat itu sangat mempermudah mempelajari secara sistematis hukum adat tersebut. Dalam hukum adat tiap-tiap lingkungan hukum itu ada ciri-ciri yang khas, yang memberikan tanda kenal pada hukum adat yang bersangkutan, sehingga mempermudah menentukan identitasnya. Adapun sembilan belas lingkungan hukum adat itu adalah sebagai berikut²⁹:

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeule)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak, terdiri dari:
 - A. Tanah Gayo (Gayo Lueus)
 - B. Tanah Alas
 - C. Tanah Batak (Tapanuli)
 - I. Tapanuli Utara, terdiri dari:
 - a. Batak Papak (Barus)
 - b. Batak Karo
 - c. Batak Simelungun
 - d. Batak Toba (Samosir, Balinge, Laguboti, Lumban Julu)
 - II. Tapanuli Selatan, terdiri dari:
 - a. Padang Lawas (Tano Sepanjang)
 - b. Angkola
 - c. Mandiling (Sayurmatangi)
 - 2a. Nias (Nias Selatan)

²⁹ Bushar Muhammad., *Asas-asas suatu pengantar*, hal 93

3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanahdatar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Koronci)
 - 3a. Mentawai (Orang Pagai)
4. Sumatra Selatan, terdiri dari:
 - A. Bengkulu (Rejang)
 - B. Lampung (Abung, Painggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan Tulang Bawang)
 - C. Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
 - D. Jambi (penduduk daerah Batin dan Penghulu)
5. Tanah Malayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatra Timur, orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Dayak, Klaimantan Barat, Kapuas-Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam-Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak dan Dayak tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo-Tamai, Long Glatt, Dayak Maanyan-Patai, Dayak Maanyan-Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot-Danum, Dayak Penyabung-Punan).
8. Minahasa (Manado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)

10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai)
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna)
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmaheira, Tobelo, Kepulauan Sula)
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)
14. Irian
15. Kepulauan Timor (Timor Timur, Timor Barat, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timor, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Savu, Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali, Tnganan Pagrisingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Lombok, Sumbawa)
17. Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Madura (Jawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)

Perlu dikemukakan bahwa pembagian ini hanya untuk sementara waktu saja. Dikemudian hari, karena tukar menukar anggapan dan lalu-lintas yang menjadi lebih rapat, dan anggota-anggota berbagai persekutuan hukum adat itu makin lama makin bertambah, maka dengan

sendirinya perbedaan hukum antara berbagai persekutuan hukum adat tersebut, yang sekarang masih ada, akan dihapuskan dan diperkecil.

B. Tanah Adat

1. Kedudukan Tanah Adat Dalam Hukum Adat

Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaan semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaannya semula; seperti karena dilanda banjir, tanah setelah air surut menjadi lebih subur. Jika tanah dengan benda di atasnya dibakar atau terbakar setelah apinya padam, keadaan tanah akan kembali seperti semula. Hal itulah yang membuat tanah dalam hukum adat memiliki arti yang sangat penting³⁰.

Melihat dari Faktanya, kenyataan bahwa tanah itu adalah³¹:

- a. Merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat)
- b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat)
- c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan

³⁰ C. Dewi Wulansari, *Op. cit.*, hlm 80

³¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kaian Kepustakaan)*, Alfabeta 2009. Hlm 311

- d. Merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan rohroh para leluhur persekutuan (masyarakat).

2. Hak-hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat

Sehubungan dengan adanya hukum tanah dalam hukum adat kemudian timbullah hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut yang dalam hukum dibagi atas 2 yaitu:

-Hak persekutuan atas tanah

1) Hak Ulayat

Hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah tersebut. Hak masyarakat hukum atas tanah ini juga disebut “hak ulayat” atau “hak pertuanan”. C. Van Vollenhoven dalam bukunya *Miskeningen in het Adatrecht* dan *De Indonesier en zijn ground* menyebutkan enam ciri dari hak ulayat tersebut, yaitu persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di tanah hak ulayat ini.

2) Hak individual diliputi oleh hak persekutuan

- 3) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
- 4) Orang asing yang may enarik hasil dari tanah-tanah ulayat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
- 5) Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lengkungan ulayat.
- 6) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak dikenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

Dalam hal jenis hak ulayat dikenal dengan adanya hak ulayat berlapis satu dan hak ulayat berlapis dua. Hak ulayat berlapis satu adalah persekutuan desa, sedangkan hak ulayat berlapis dua adalah persekutuan daerah.

Daya berlaku hak ulayat memiliki daya laku ke dalam dan daya laku ke luar. Daya laku ke dalam berarti memberi arti bahwa hak ulayat ini menjamin kehidupan dari para anggotanya yang ada dilingkungan ulayat tersebut, karena setiap anggotanya berhak untuk mengambil hasil dari

tanah, dan binatang serta tumbuhan yang ada di atas ulayat tersebut. Hubungan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan persekutuan adalah timbal balik dan memiliki daya kekuatan yang sama. Artinya, hak perseorangan mempertahankan diri terhadap hak persekutuan adalah sama kuatnya dengan hak persekutuan mempertahankan diri terhadap hak perseorangan. Mengenai daya laku ke luar, hak ulayat memberi arti bahwa hak ulayat dapat juga berlaku terhadap orang-orang luar hendak memasuki persekutuan mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala persekutuan dan sebelum pemohon mereka diizinkan terlebih dahulu harus memberi sesuatu kepada persekutuan. Apabila dalam persekutuan mereka akan mengolah tanah, kepadanya hanya diberikan hak menikmati (*genotrecht*) yang diberikan hanya satu kali panen, mereka tidak boleh menjadi ahli waris, ataupun membeli tanah. Disamping itu, persekutuan juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di atas lingkungan ulayat yang dilakukan oleh siapa pun, baik oleh anggota persekutuan maupun oleh orang lain yang tidak dikenal. Dapat disimpulkan bahwa isi dari hak ulayat terdiri atas:

1. Hak dan kewajiban atas tanah sendiri
2. Hak dan kewajiban terhadap orang luar
3. Hak dan kewajiban terhadap warga persekutuan.

Tentang pimpinan ulayat, yaitu orang yang menjalankan pemerintahan serta kekuasaan-kekuasaan yang timbul sebagai akibat dari

hak ulayat dalam lingkungan ulayat. Apabila kekuasaan asing memasuki lingkungan ulayat maka pimpinan ulayat dipisah, yaitu antara pimpinan yang menjalankan pemerintahan atau disebut juga dengan dneghulu ulayat dengan pimpinan yang mengurus tanah yang disebut wali tanah. Penghulu rakyat berfungsi sebagai pimpinan persekutuan keluar dan wali tanah berfungsi sebagai pemimpin ulayat ke dalam. Tetapi apabila lingkungan ulayat dalam keadaan tenang tidak ada gangguan dari luar, biasanya kekuasaan penghulu rakyat dan wai tanah berada di satu tangan. Ada kalanyapula dalam suatu lingkungan ulayat yang berkuasa adalah orang-orang pendatang yang bukan anggota dari lingkungan ulayat tersebut.

Objek dari hak ulayat pada hakikatnya meliputi tanah, air, tanam-tanaman yang tumbuh, serta binatang-binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat. Karena pengaruh dari berbagai tempat, maka berlakunya hak ulayat pada tiap daerah adalah berbeda-beda. Juga dalam suatu lingkungan ulayat, daya berlaku ulayat mungkin berbeda-beda sesuai dengan tempatnya.

Tentang perubahan hak ulayat menjadi hak perseorangan baru dapat terjadi apabila ditempuh dengan cara :

1. Apabila seorang pimpinan lingkungan ulayat menyatakan dirinya sebagai pendukung hak ulayat dan akibatnya pimpinan lingkungan ulayat yang biasanya raja, menyatakan dirinya karena kekuasaannya sebagai pemilik tanah di bawah kekuasaannya.

2. Apabila anggota-anggota ulayat mencari orang-orang luar untuk mengusahakan tanah-tanah hutan yang kosong dengan mengadakan pembayaran lebih dahulu.
3. Apabila anggota-anggota ulayat ditarik biaya jika mereka ingin mengusahakan tanah tersebut.

3.Hak Purba

Hak purba³² adalah sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang bercorak agraria yang berdominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *condition sine qua non*.

Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil (terutama yang bersifat territorial) dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian itu, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang itu terikat.

Hak Purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

³² Imam Sudiyat, *Hukum Adat SKETSA ASAS*, Liberty, Yogyakarta., hlm 1

Ciri-ciri pokok yang terlihat dengan jelas diluar jawa, adalah:

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga sepersekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan restriksi : hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
5. Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.
 - a. Hak Perseorangan Atas Tanah

Dengan berlakunya hak ulayat ke dalam, maka setiap anggota persekutuan berhak mengadakan hubungan hukum dengan tanah serta dengan semua isi yang ada di atas tanah ulayat tersebut. Adapun hak

perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat adalah berupa³³:

1. Hak milik atas tanah

Yang dimaksud dengan hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat untuk bertindak atas kekuasaannya atas tanah ataupun isi dari lingkungan atau wilayah ulayat. Hak milik terdiri atas hak milik terikat dan hak milik tidak terikat. Hak milik terikat adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam lingkungan masyarakat adat seperti hak milik komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa.

2. Hak menikmati atas tanah

Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang diberikan kepada seorang merupakan haknya untuk menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali saja. Hak ini biasanya diberikan kepada orang luar lingkungan ulayat yang diizinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan ulayat.

3. Hak terdahulu

Tentang hak terdahulu (*voorkeursrecht*) adalah hak yang diberikan pada perseorangan untuk mengusahakan tanah itu dimana orang tersebut di dahulukan dari orang lain. Ini dapat terjadi misalnya tentang sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari ulayat atau berupa tanah ulayat.

³³ *Ibid.*, hlm 86

4. Hak terdahulu untuk dibeli

Begitu pula mengenai hak terlebih dahulu untuk dibeli; dimana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hak ini sering disebut hak wewenang beli dan hal ini dapat terjadi karena pembeli adalah sanak saudara si penjual, anggota masyarakat atau ulayatnya, tetangga dari si penjual itu sendiri.

5. Hak memungut hasil karena jabatan

Mengenai hak memungut hasil karena jabatan (*ambtelijk profijrecht*) bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah ia tidak menduduki jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.

6. Hak pakai

Hak pakai (*gebruiksrecht*) adalah hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut.

7. Hak gadai dan hak sewa

Hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut. Selama belum ditebus oleh pemilik tanah, maka selama itu pula hak atas tanah menjadi hak milik yang memberi gadai, begitu pula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu berlangsung hingga putusnya perjanjian sewa menyewa atas tanah tersebut.

8. Hubungan Hak Purba dengan *Hak Perorangan*

Di berbagai bagian Hindia-Belanda terdapat lingkungan-lingkungan hak purba yang satu sama lain dipisahkan oleh wilayah-wilayah tanah bertuan yang luas. Dibagian-bagian lain terdapat wilayah-wilayah yang hampir tak ada sebidang tanahpun yang termasuk dalam hak purba. Hak purba itu ditempat yang satu mash kuat, sedangkan di tempat lain sudah lemah. Dan gejala yang bersifat umum ialah, semakin maju dan bebas penduduk dalam usaha-usaha pertaniannya, semakin melemah hak purba itu dengan sendirinya. Akhirnya jika hak purbaitu sudah lemah sama seklai, maka dengan sendirinya hak perorangan (hak milik Bumiputra) akan berkembang dengan pesatnya.

Fakta tersebut dapat dirumuskan demikian: *hak purba dan hak perorangan itu bersangkut-paut dalam hubungan kempis-mengembang, desak-mendesak, batas-membatasim mulur-mungkret* tiada henti. Dimana hak purba kuat, disitu hak perorangan lemah; demikian pula sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Tongkonan Mandetek dan Tanetena Datuliling, dan Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kecamatan Kajang. Penulis juga melakukan penelitian di Kantor BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor BPN Tana Toraja, dan Kantor BPN Bulukumba serta penulis melakukan wawancara dengan komunitas AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Dengan melakukan penelitian tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui dan mengkaji Sudut Pandang para Petua/ Kepala Adat, Komunitas Adat, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional tentang Peraturan Menteri Agraria/ Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Hak Komunal.

B. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memperoleh data-data akurat mengenai masalah penelitian.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian pustaka (*Library research*), yaitu menelaah berbagai buku, koran, situs internet, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai macam literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
- b. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber, dalam hal ini

Kepala Adat, Kantor BPN, dan Komunitas serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sudut Pandang Hak Komunal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015

Tanah adalah salah satu hal yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia karena merupakan tempat bagi manusia untuk menggantungkan hidup dan melanjutkan penghidupannya, sehingga banyaknya konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah berkaitan dengan sengketa tanah. Pentingnya tanah dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kegunaan tanah itu sendiri, tak terkecuali Masyarakat Hukum Adat. Dalam Masyarakat Hukum Adat, tanah menjadi objek vital karena sumber kehidupan mereka digantungkan melalui Tanah, keberadaan mereka diakui dengan adanya wilayah adat yang biasa disebut dengan tanah adat. Tanah adat merupakan tanah yang diatur oleh masyarakat hukum adat yang sering disebut dengan Hak Ulayat.

Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. sepanjang kenyataannya masih ada. Di setiap daerah, hak ulayat memiliki nama yang berbeda-beda, contohnya di Ambon disebut dengan *Patuanan*, di Kalimantan disebut dengan *Panampeto* dan *Pangawasan*, sedangkan di Sulawesi disebut dengan *Limpo*.

Di Sulawesi-Selatan, terdapat dua kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan pengakuan Hak ulayatnya yang masih ada, yaitu di Kabupaten Tana Toraja (Tongkonan) dan Kabupaten Bulukumba (Kajang). Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan hak ulayat di Tana Toraja tetap dianggap masih ada tetapi sudah terlihat tidak sekuat yang dulu. Ulayat mereka biasa disebut dengan *Tana Tongkonan* yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun temurun, hal ini biasa disebut juga dengan *Tanah Pusaka*. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (*Ammatoa*) bermukim di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Tanah Ulayat mereka dinamai *Borong* (Hutan).

Hak Ulayat atau beberapa istilah yang sejenisnya yang merupakan hak masyarakat hukum adat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Perjanjian hak ulayat di dasari atas 2 hak, yaitu hak persekutuan dan hak perseorangan.

1. Hak persekutuan

Hak persekutuan ini muncul karena adanya hubungan yang erat dan bersifat religio magis. Dalam hak persekutuan, masyarakat hukum adat memiliki dan memperoleh hak menguasai atas tanah. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk memungut hasil dari tanah tersebut. hak persekutuan ini biasanya dikenal juga dengan sebutan “hak purba”.

Terhadap hak persekutuan ini, dapat berlaku mengikat ke dalam dan keluar³⁴:

1). Ke dalam

Hak ulayat mengikat seluruh anggota persekutuan untuk menikmati hasil tanam tumbuh dan segala pemanfaatannya. Kondisi ini berarti membatasi kegiatan pengalihan secara perseorangan dari anggota persekutuan hukum.

2). Ke luar

Hak ulayat dapat memberikan penikmatan atas hasil tanam tumbuh dan segala pemanfaatannya, tetapi terbatas hanya apabila ada persetujuan dari kepala persekutuan.

Hak pertuanan ke luar dari masyarakat itu ternyata dari adanya:

- a) Larangan terhadap orang luaran untuk menarik keuntungan dari tanah itu, kecuali dengan izin dan sesudah membayar uang pengakuan (*recognitie*). Para

³⁴ I Gede A.B Wiranata.2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 225

warga yang mengumpulkan hasil tanah untuk maksud dagang biasanya diperlukan sebagai orang luaran;

- b) Larangan, pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perseorangan atas tanah pertanian. Untuk berbagai lingkungan hukum dapat disebutkan sebagai pernyataan hak pertuan (sebagai imbalan kewajiban hukum); tanggung jawab dari persekutuan itu terhadap delik-delik berat yang telah terjadi diberbagai daerah itu, jika yang bersalah tak dapat ditentukan.

Disinilah akan tampak sampai sejauh mana persekutuan mempunyai daya mengikat. Sebab semakin lemah daya mengikat hak ulayat ini ke dalam, menyebabkan semakin kuat daya mengikatnya ke luar. Ini berarti peluang untuk munculnya pemanfaatan oleh masyarakat di luar persekutuan semakin besar. Akibat akhirnya adalah bahwa makin melemahnya hak ulayat dan makin menguatnya hak perseorangan. Objek hak ulayat dapat meliputi:

- Tanah (daratan);
- Air (perairan: kali, danau, pantai);
- Tumbuhan-tumbuhan yang hidup secara liar di atas tanah hak ulayat (damar, durian, dan tanaman keras lainnya); dan

- Binatang yang hidup secara liar (kerbau, menjangan, dan lain-lain)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Pentingnya tanah bagi kehidupan, sebelum adanya UUPA maka penguasaan itu disebut dengan hak ulayat. Setelah adanya Undang-Undang dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menetapkan bahwa “*hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat*”. Pada dasarnya hak ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu mengenai eksistensi dan mengenai pelaksanaannya.

Pelaksanaan pengaturan tentang Hak ulayat diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR/BPN) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Setelah beberapa tahun PERMEN ATR/BPN tersebut diberlakukan, Kementrian Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri yang terbaru. PERMEN ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN)

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan tertentu.

Hak Komunal menurut PERMEN ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 pada pokoknya menyatakan bahwa Hak Komunal atas Tanah, disebut dengan Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan. Dalam PERMEN ATR/BPN terbaru tersebut jelas terlihat tentang pendefinisian Hak komunal yang sama sekali tidak menyebutkan mengenai hak ulayat. Pada pokoknya Aturan yang dibuat dalam PERMEN ATR/BPN ini selain berlaku untuk masyarakat hukum adat berlaku juga untuk masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu misalnya kawasan hutan dan kawasan pekebunan. Penekanannya adalah bahwa Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang telah lama berada dalam aturan adat dan menjaga tanah yang ada di dalamnya serta sumber daya alamnya, sedangkan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu adalah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan maupun perkebunan yang telah menguasai tanah selama 10 tahun secara berterus-terus juga diatur dalam PERMEN ATR/BPN terbaru tersebut.

Ada perbedaan sangat substansial PERMEN ATR/BPN Nomor 9 tahun 2015, hak ulayat yang pengaturan pelaksanaannya dijabarkan dalam PERMEN ATR/BPN yang lama sama sekali tidak mengatur proses

sertifikasi hak, hal tersebut juga merupakan salah satu alasan lahirnya PERMEN ATR/BPN Nomor 9 tahun 2015 tentang hak komunal dan penekanannya adalah hak bersama masyarakat hukum adat dengan menjamin kepastian hukum terhadap alas hak wilayah adat dengan sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu pun dengan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dalam PERMEN ATR/BPN terbaru tersebut memberikan angin segar bagi status kepemilikan tanah untuk kehidupannya yang sumbernya dari tanah Negara. Tidak lain adalah kepastian hukum dan menghindarkan dari sengketa tanah.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BPN Sulsel menyatakan bahwa Hak komunal dalam PERMEN ATR BPN Nomor 9 tahun 2015 adalah jaminan kepastian hukum untuk wilayah adat masyarakat adat agar terhindar dari klaim individu suatu wilayah adat, pensertifikasian adalah hal mutlak dari hak kepemilikan, baik hak milik individu maupun hak bersama yang dalam PERMEN ATR/BPN ini menyebutnya sebagai hak komunal³⁵. Penjelasan tersebut sejalan dengan penjelasan BPN Kabupaten Tana Toraja yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak komunal bisa dipersamakan dengan hak ulayat yang biasa dikenal dalam Masyarakat Hukum Adat Tongkonan karena adanya hak bersama atas suatu tana tongkonan dan tidak ada klaim individu dan secara spesifik tentang *tana tongkonan* yang belum

³⁵ BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ansyar Kadir (*Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah*) pada tanggal 31 Maret 2016

disertifikatkan hingga saat ini sehingga dengan adanya aturan tentang Hak komunal pihak BPN Kabupaten Tana Toraja setuju dengan adanya pensertifikasian terhadap *tana tongkonan* sebagai kepemilikan bersama atas wilayah adat tongkonan³⁶.

Pihak BPN Kabupaten Bulukumba juga berpendapat bahwa PERMEN Nomor 9 tahun 2015 memberikan landasan hukum bagi dua subjek hukum. Dengan PERMEN ATR/BPN yang terbaru ini masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dengan jangka waktu 10 tahun apabila dianggap layak untuk mendapatkan hak milik atas tanah maka atas izin Negara melalui pihak BPN bisa mendapatkan alas hak. Tidak akan ada lagi masyarakat yang secara *illegal* menguasai tanah dalam kawasan hutan maupun perkebunan dan tentunya bisa menjaga kelestarian lingkungan alam karena dimnafaatkan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat. Selain itu menurut beliau terkait sertifikat yang ada dalam hak komunal itu memang penting bagi wilayah yang punya kawasan adat agar supaya tidak ada lagi tanah yang bersengketa mengenai batas-batas wilayah tanah adat³⁷.

Namun sampai saat ini Kementrian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional belum memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan dari PERMEN ATR/BPN Nomor 9 tahun 2015 tersebut sehingga dari pihak BPN Provinsi Sulawesi – Selatan dan BPN

³⁶ BPN Kabupaten Tanah Toraja, Bapak Supriadi (*Kasubsi Pendaftaran Hak*) pada tanggal 5 April 2016

³⁷ BPN Kabupaten Bulukumba yang diwakili oleh Bapak Debri Adriansyah (*Kepala Seksi sengketa, konflik, dan perkara*) pada tanggal 27 April 2016

Kabupaten/Kota belum mensosialisasikan mengenai keberlakuan PERMEN ATR/BPN tentang hak komunal tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu Komunitas Adat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) menyatakan sudut pandanginya terhadap hak komunal dalam PERMEN ATR BPN Nomor 9 tahun 2015 tersebut. Menurut AMAN hak komunal sebenarnya adalah hak pengelolaan terhadap suatu wilayah yang berisi tentang sifat dan sistem pengeolaan suatu kawasan atau wilayah oleh masyarakat tertentu dan masyarakat adat. Ketua AMAN sulsel menyatakan bahwa sertifikat ini merupakan bentuk persil dari upaya pengelolaan hak komunal. Belum ada kejelasan tentang sertifikasi hak komunal terkait dengan mekanisme pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat komunal.

Pandangan lain di ungkapkan petua adat tongkonan mengenai hak komunal, salah satunya petua adat yang ada di Tongkonan Mandetek, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, yaitu Tato Dena (rohaniawan). Tato Dena menganggap bahwa hak komunal dan hak ulayat merupakan hak yang sama, yaitu hak bersama atas tanah oleh masyarakat hukum adat. Namun, dalam hak komunal memberikan syarat yang berbeda dengan hak ulayat salah satunya dengan harus mensertifikatkan tanah adat tersebut. Tato Dena menyatakan bahwa masalah tanah adat tidak perlu disertifikatkan, karena dari dahulu semua tongkonan tidak perlu disertifikatkan karena apabila disertifikatkan atas nama seseorang saja maka lapisan ke tiga atau cucu cicit dapat saja

mengklaim kepemilikan tanah, disisi lain Sertifikat akan membawa malapetaka karena akan muncul perang kekeluargaan dalam hal kepemilikan tanah. Selanjutnya dari Tongkonan Tanetena Datuliling, desa (Lembang) nonongan, Kecamatan sopai, Kabupaten Toraja Utara, Drs Yusuf "*Suliling To Tumoke Buria*" (kepala tongkonan), menurutnya hak komunal dalam PERMEN ATR BPN yang terbaru ini terkesan memarginalkan keberadaan masyarakat adat dengan ketentuan dan syarat yang dimuat dalam PERMEN ini dan terkait dengan sertifikat tanah yang diwajibkan itu dianggap bermasalah karena akan mengakibatkan masalah besar bagi tana tongkonan.

Sebenarnya kepala tongkonan pada dasarnya setuju tentang segala hal pengaturan hak komunal, hanya mekanisme tentang kepemilikan dari sertifikat tersebut yang harus dibenahi agar tidak menimbulkan polemik. Sedangkan Leonardo . B.S seorang Budayawan Tana Toraja berpendapat bahwa tanah adat khususnya Tongkonan harus disertifikatkan ini digunakan sebagai pelengkap hukum adat. Tapi sertifikat itu bukan atas nama pribadi tapi atas nama orang yang dituakan di tongkonan tersebut atau langsung atas nama tongkonan. Dan dimusyawarahkan di keluarga tongkonan tersebut.

Sedangkan menurut *Ammatoa* sebagai Kepala Adat Masyarakat Kajang, sertifikasi terhadap tanah hak milik dalam kawasan adat kajang sangat diperlukan karena hal ini akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui batas-batas wilayah tanah yang mereka miliki. Selama ini

memang sudah ada batas wilayah yang telah di atur oleh *Ammatoa* dengan pemangku adat yang lain akan tetapi hal ini akan lebih baik kiranya memang dengan diperkuat oleh adanya sertifikat dari pemerintah. Tetapi, terhadap tanah adat (*tanah a'leleang dan galung toaia'*) yang bukan merupakan hak milik dari masyarakat adat kajang tidak boleh disertifikatkan karena merupakan tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat kajang berdasarkan keputusan (*le'bak*) pada musyawarah Masyarakat Hukum Adat Kajang.

Masih kurangnya sosialisai tentang PERMEN ATR BPN Nomor 9 tahun 2015 tersebut mengakibatkan beberapa kalangan biasa salah mempresepsikan tentang hak komunal, padahal sebenarnya hak komunal merupakan nama lain dari kepemilikan bersama dari tanah adat atau yang Van vollenhoven biasa menyebutnya tanah ulayat (Hak ulayat). Menurut Maria SW Sumardjono Hak Komunal dan Hak Ulayat tampaknya Peraturan Menteri menyamakan antara Hak Ulayat dan Hak Komunal. Dalam pembicaraan sehari-hari menggunakan istilah “hak komunal”, “tanah bersama”, “tanah ulayat” barangkali lebih “bebas” karena ada dampak implikasi hukumnya. Namun, ketika istilah itu dirumuskan dalam perundang-undangan harus jelas konsepsinya karena ada implikasi hukumnya. Penyamaan itu antara lain tampak dalam konsideran b “bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak Komunal dan serupa itu dari Masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Saat ini masih diperlukan aturan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dengan mengakomodasi putusan MK yang relevan serta harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Memperkenalkan entitas baru Hak Komunal dalam peraturan perundang-undangan itu sah-sah saja sepanjang landasan filosofi, yuridis, dan sosiologisnya kuat. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, di samping tidak ada jaminan kepastian hukum, peraturan itu menjadi tidak bermanfaat.

Sedangkan menurut Andi Suriyaman Mustari Pide Pakar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga menyatakan kalau berbicara tanah adat, maka akan berbicara hak kolektif masyarakat adat. Namun, hak kolektif ini dimungkinkan menjadi hak perorangan bilamana sudah dimiliki secara turun temurun. Hal inilah yang harus dilindungi oleh negara dan tidak bisa dicaplok begitu saja. Apalagi jika dipindahkan hak penguasaannya begitu saja³⁸.

Jelas terlihat bahwa sebenarnya hak komunal maksudnya sama dengan hak ulayat yang kita kenal selama ini. Letak pembedanya adalah pelaksanaan hak komunal lebih mengakui adanya kepemilikan bersama dalam sebuah akta pengakuan hak agar terhindar dari sengketa tanah antar sesama masyarakat adat.

Namun Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 ternyata menimbulkan *Pro-Kontra* di dalam masyarakat hukum adat. Ini merupakan

³⁸ *Harian Fajar*, 21 Oktober 2009., peraturan Terkait Tanah Adat

Pendapat dan sudut pandang masyarakat Adat yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut masyarakat adat yang *Pro* terhadap PERMEN ini maka hal tersebut akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengetahui batas wilayahnya dan juga mempermudah Pemerintah untuk menerapkan PERMEN tersebut. sebaliknya jika masyarakat yang *Kontra* terhadap PERMEN yang terbaru ini maka sebaiknya pemerintah segera melakukan sosialisasi dan terjun langsung untuk memberikan masyarakat pengetahuan lebih tentang PERMEN terbaru ini.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, penulis kemudian menyimpulkan maksud dari permen Nomor 9 Tahun 2015 bahwa hak komunal pengaturannya lebih kompleks dan menyadari akan pentingnya pengakuan hak individu dan hak bersama atau kolektif. Hak komunal dalam PERMEN Nomor 9 Tahun 2015 tidak menafikkan eksistensi hak ulayat yang sejak dahulu menjadi panduan bagi masyarakat hukum adat untuk mengatur hal-hal yang ada dalam suatu masyarakat karena hak ulayat jelas dalam UUD 1945 dan UUPA. Hak komunal sama dengan hak ulayat hanya pebedaannya terletak pada syarat dari hak komunal yang mengharuskan tanah tersebut di sertifikatkan dalam bentuk hak kepemilikan bersama dari nama masyarakat adat setempat dan hak milik individu terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan hutan maupun perkebuan untuk tanah yang telah dikelolanya selama bertahun-tahun.

B. Implikasi Pencabutan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 1999 ke Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015

Kebiasaan masyarakat hukum adat sangat bergantung pada aturan hak Ulayat. Peraturan pelaksanaan dari UUPA yang mengatur lebih jelas mengenai hak dan tanah ulayat adalah PERMEN ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Peraturan ini memberikan definisi tentang tanah ulayat, hak ulayat dan prosedur pengakuan hak ulayat.

Secara umum, hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu: "hak ulayat" dan "hak pakai". Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus karenanya. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut. Sementara hak pakai

membolehkan seseorang untuk memakai. Sebidang tanah bagi kepentingannya biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama. Sementara Van Dijk membagi tiga bentuk hak-hak atas tanah adat yaitu: hak persekutuan atau pertuanan, hak perorangan, dan hak memungut hasil tanah. Perbedaannya adalah sebagai berikut, keuntungan dari tanah dengan segala yang ada di atasnya, misalnya mendirikan rumah, berburu, maupun menggembalakan³⁹:

1. Hak persekutuan atau hak pertuanan mempunyai akibat ke luar dan ke dalam. Akibat ke dalam antara lain memperbolehkan anggota persekutuan (etnik, sub etnik, atau fam) untuk menarik ternak. Izin hanya sekedar dipergunakan untuk keperluan hidup keluarga dan diri sendiri, bukan untuk diperdagangkan. Akibat keluar ialah larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan dari tanah ulayat, kecuali setelah mendapat izin dan sesudah membayar uang pengakuan (*recognitie*), serta larangan pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat terhadap orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perorangan atas tanah pertanian.
2. Hak perorangan atas tanah adat terdiri dari hak milik adat (*inland bezitrecht*), dimana yang bersangkutan tenaga dan usahanya telah terus menerus diinvestasikan pada tanah tersebut,

³⁹ Iswantoro, . *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Agraria Nasional*,. 2012. hlm 99

sehingga kekuatannya semakin nyata dan diakui oleh anggota lainnya. Kekuasaan kaum atau persekutuan semakin menipis sementara kekuasaan perorangan semakin kuat. Hak milik ini dapat dibatalkan bila tidak diusahakan lagi, pemiliknya pergi meninggalkan tanah tersebut, atau karena tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan.

3. Hak memungut hasil tanah (*genotrecht*) dan hak menarik hasil.

Tanah ini secara prinsip adalah milik komunal kesatuan etnik, namun setiap orang dapat memungut hasil atau mengambil apapun yang dihasilkan tanaman di atas tanah tersebut.

Penegakan hak ulayat masyarakat hukum adat lebih merupakan usaha dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini tampak dari perkembangan politik hukum tanah di Indonesia sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda sampai pada Pemerintah Negara Indonesia sekarang ini. Bahkan, perkembangan politik hukum beberapa negara di Asia pun menunjukkan kecenderungan yang sama. Secara asumptif dapat dikatakan, semakin demokratis suatu negara, semakin baik pula kemungkinan perjuangan penegakan eksistensi hak ulayat. Boedi Harsono menyatakan bahwa politik pertanahan pemerintahan kolonial diarahkan untuk tidak mengakui dan menghormati Hak Ulayat (*beschikkingsrecht*: Van Vollenhoven atau *wewengkon*)⁴⁰. Pengambilan

⁴⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 201-202

tanah ulayat dalam praktik disertai pemberian sesuatu yang disebut "*recognitie*", sebagai pengakuan adanya hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah yang diambil. Sesungguhnya, rendahnya pengakuan terhadap tanah milik rakyat bumiputera bukan saja terhadap tanah komunalnya, tetapi juga kepada tanah-tanah milik adat lainnya yang sudah bersifat individual seperti hak memakai individual yang turun temurun (*erfelijk individueelrecht gebruiksrecht*) dan *Inlandsbezitrecht*. Dalam administrasi pertahanan, tanah-tanah milik adat tersebut dikenal sebagai *onvrij lands domein* (tanah negara tidak bebas). Pada peta pendaftaran kadaster, tanah-tanah tersebut dilukiskan dengan sebutan *lands domein*, tanpa menyebut adanya hak rakyat yang diakui dan dilindungi hukum. Dengan demikian, jika melihat peta kadaster saja, orang sering keliru menafsirkan status hukum tanah yang bersangkutan, seakan-akan tidak ada hak rakyat yang membebaninya⁴¹.

Mengakui hak atas tanah individual berarti bahwa secara "*post facto*" negara mengakui hak-hak sebuah komunitas untuk menggunakan tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda⁴²:

a. Memberikan sertifikat resmi

Hal ini dapat berjalan dengan baik dalam kasus-kasus di mana masyarakat tidak begitu erat terajut dan di mana orang luar agak mudah diintegrasikan ke dalam sistem lokal. Bahkan, alasan bahwa

⁴¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi Cetakan Kesepuluh, 2005, hlm. 46

⁴² *Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum*, Van Vollenhoven Institute, Jakarta 2010, hlm 5

ada hak atas tanah “komunal” hanya berarti bahwa sebenarnya orang-orang yang mengatakan itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan individual, karena mereka menggunakan tanah negara yang sertifikat individualnya tidak (atau belum) mereka dapatkan dan karena itu mereka mengklaim tanah tersebut sebagai tanah komunal. Seperti yang akan diuraikan di bawah ini, tentu saja terkait tanah di bawah yurisdiksi Departemen Kehutanan hal ini sering bermasalah, karena jenis penggunaan suatu tanah tidak serta merta berarti bahwa jenis hak yang diakui terhadapnya juga sama. Masalah umum yang terkait dengan pemberian sertifikat hak atas tanah juga berdampak pada, misalnya, bahaya konflik, biaya untuk sertifikasi, dll.

b. Mengesahkan sistem “semi-formal” yang digunakan oleh masyarakat untuk membuktikan kepemilikan mereka

Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih dan tidak memerlukan biaya yang berkaitan dengan sertifikat individu. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat diterapkan lebih mudah karena bukti pembayaran pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk versi yang lebih formal dari sistem kepemilikan dan penggunaan tanah. Sebuah fakta yang menarik adalah bahwa hal itu juga dapat dikombinasikan dengan kebijakan “memaafkan” (*gedogen*), yang berarti bahwa meskipun secara formal melawan hukum, pemerintah membiarkan sistem penggunaan tanah yang sudah ada terus berjalan seperti itu jika kondisi tertentu terpenuhi.

Eksistensi hak ulayat setelah adanya hak komunal ternyata belum bisa dikalahkan. Masyarakat hukum adat sampai saat ini masih mematuhi aturan mengenai hak ulayat. Hak ulayat memang tidak dijelaskan secara keseluruhan dalam UUPA tapi keberadaannya tetap diakui dan landasannya berdasarkan UUD 1945. Sedangkan secara garis besar PERMEN ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 mengatur hak komunal bukan hanya untuk masyarakat hukum adat, namun juga berlaku bagi masyarakat lain yaitu masyarakat yang berada di kawasan hutan atau perkebunan. Masyarakat hukum adat sendiri dianggap sebagai masyarakat yang terikat dengan hukum adat, baik secara keturunan maupun kesamaan tempat tinggal.

Masing-masing PERMEN ATR/BPN ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, hak ulayat telah dikenal dalam masyarakat hukum adat. walaupun hak ulayat telah dicabut dan digantikan dengan hak komunal. Tetapi sejauh ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah melalui BPN mengenai kelanjutan atau petunjuk teknis aturan pelaksanaan hak komunal, akan tetapi ada beberapa masyarakat adat yang tetap setuju dengan adanya sertifikat terhadap tanah ulayat demi kepastian hukum. Tanah ulayat sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat hukum adat.

Namun sebenarnya dampak pencabutan PERMEN ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengganti PERMEN ATR/BPN Nomor 9

Tahun 2015 membuat kontroversi antar masyarakat. Pada pasal 18 dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 9 tahun 2015 yang berbunyi

“pada saat peraturan ini mulai berlaku peraturan menteri nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”

Ketentuan tersebut berimplikasi pada beberapa pengaturan tentang hak ulayat dalam PERMEN ATR/BPN nomor 5 tahun 1999. Salah satu hal yang berubah dalam ketentuan PERMEN ATR/BPN Nomor 9 tahun 2015 adalah mekanisme pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat.

Dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 5 tahun 1999 pada pasal 5 ayat (2) berbunyi

“Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”

Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur tentang bentuk pengakuan hak ulayat yang dituangkan dalam “peta dasar pendaftaran tanah” serta “dicatat dalam daftar tanah” sedangkan dalam PERMEN ATR/BPN nomor 9 tahun 2015 tersebut pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat dilaksanakan dengan cara sertifikasi tanah.

Perbedaan paling mendasar dari kedua PERMEN ATR/BPN tersebut adalah dalam PERMEN ATR/BPN nomor 9 tahun 2015 tersebut tidak menyebutkan sama sekali tentang “hak ulayat” sebagaimana yang terdapat pada PERMEN ATR/BPN nomor 5 tahun 1999. Namun,

keberadaan hak ulayat tetaplah diakui sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 pada pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia”.

Sejalan dengan itu, dalam UUPA pengakuan terhadap hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat juga tetap diakui sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 UUPA.

Dalam PERMEN ATR/BPN nomor 9 tahun 2015 tidak hanya mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat, namun juga hak masyarakat tertentu yang hidup dalam kawasan hutan dan perkebunan. Bentuk pengakuan hak dalam PERMEN ATR/BPN ini juga dilaksanakan dengan sertifikasi hak komunal atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum tertentu. Pada dasarnya pengadaaan sertifikat pada hak komunal akan menguatkan sistem hukum yang ada. Selain sebagai alas hak yang berakibat pada kepastian hukum yang dimiliki oleh pemilik tanah, hal ini juga dapat meminimalisir konflik keagrariaan yang terjadi selama ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kemudian penulis menyimpulkan bahwa Impilkasi pencabutan PERMEN ATR/BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang hak ulayat menjadikan eksistensi Hak Ulayat saat ini masih diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat walaupun PERMEN ATR/BPN terbaru tentang hak komunal dikeluarkan untuk menggantikan PERMEN ATR/BPN yang sebelumnya. Selain dari pada itu, masyarakat

juga merasa bahwa hak ulayat ini sangat membantu kelangsungan hidup mereka sejak dahulu.

Dicabutnya PERMEN Nomor 5 Tahun 1999 dan di gantikan oleh PERMEN Nomor 9 Tahun 2015 sebagian masyarakat setuju dan ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan adanya PERMEN yang baru tersebut. Penyelesain sengketa dan konflik mengenai tanah hak ulayat seharusnya dapat dilakukan secara bersama-sama, yang melibatkan pihak-pihak yang membuat aturan dan masyarakat hukum adat itu sendiri, berdasarkan hukum negara dengan menerapkan unsur-unsur yang ada pada hukum adat dan hukum agama, sebagaimana Pasal 5 UUPA.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PERMEN ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 bahwa hak komunal pengaturannya lebih kompleks dan menyadari akan pentingnya pengakuan hak individu dan hak bersama atau kolektif. Hak komunal dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 tidak menafikkan eksistensi hak ulayat yang sejak dahulu menjadi panduan bagi masyarakat hukum adat untuk mengatur hal-hal yang ada dalam suatu masyarakat karena hak ulayat jelas dalam UUD 1945 dan UUPA. Hak komunal sama dengan hak ulayat hanya perbedaannya terletak pada syarat dari hak komunal yang mengharuskan tanah tersebut di sertifikatkan dalam bentuk hak kepemilikan bersama dari nama masyarakat adat setempat dan hak milik individu terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan hutan maupun perkebuan untuk tanah yang telah dikelolanya selama bertahun-tahun.
2. Bahwa Impilkasi pencabutan PERMEN ATR/BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang hak ulayat menjadikan eksistensi Hak Ulayat saat ini

masih tetap diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat walaupun PERMEN ATR/BPN terbaru tentang hak komunal dikeluarkan untuk menggantikan PERMEN ATR/BPN yang sebelumnya. Selain dari pada itu, masyarakat juga merasa bahwa hak ulayat ini sangat membantu kelangsungan hidup mereka sejak dahulu. Dicabutnya PERMEN ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 dan digantikan oleh PERMEN ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 sebagian masyarakat setuju dan ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan adanya PERMEN ATR/BPN yang baru tersebut.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah :

1. Pemerintah bisa segera melakukan sosialisai kepada masyarakat hukum adat agar kiranya mereka bisa lebih mengetahui maksud dan tujuan Pemerintah menerbitkan PERMEN ATR/BPN yang terbaru ini.
2. Masyarakat hukum adat seharusnya memberitahukan kepada Pemerintah agar supaya pemerintah pun mengetahui masalah yang terjadi dalam kawasan masyarakat hukum adat.
3. Peran serta masyarakat dalam penerapan PERMEN ATR/BPN 9 2015 sangatlah dibutuhkan. Sehingga diharapkan masyarakat secara aktif dan sadar dapat terlibat dalam proses penerapan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdurrahman,. 1992. *Kedudukan HUKUM ADAT dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Akademika Pressindo

Boedi Harsono,. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan;

Bushar Muhammad,. 1988. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita; Jakarta

-----,. *Asas-asas Suatu Pengantar*

C. Dewi Wulansari,. 2012. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama; Bandung

Effendi Perangin,. 1986. *Hukum Agraria Di Indonesia*,. Rajawali Pers; Jakarta

I Gede A.B Wiranata,. 2005. *Hukum Adat Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti; Bandung

Iswantoro,. *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Agraria Nasional*,. 21 Oktober 2009

Hilman Hadikusuma,. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,. CV.Mandar Maju; Bandung

Imam Sudiyat,.1981. *Hukum Adat SKETSA ASAS*, Liberty; Yogyakarta

Soekanto,. 2012. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. CV. Rajawali; Jakarta

Soerjono Soekanto,.2005. *Hukum Adat Indonesia*. PT Rajawali Pers; Jakarta

Suryaman Mustari Pide,. 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Pelita Pustaka; Makassar

Suryaman Mustari Pide dan Sri Susyanti,. 2008. *Dasar-dasar Hukum Adat*. Pelita Pustaka; Makassar

Supriadi,. 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika

Tolib Setiady,. 2013. *Intisari Hukum Adat Indoneisa (Dalam Kajian Pustaka)*, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung

Urip Santoso,. 2008. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Penada Media Group

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Agraria. Redaksi Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 (*Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pada Kawasan Tertentu*)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan tertentu.

C. SUMBER LAIN/ WAWANCARA

Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum,. Van Vollenhoven Institute., Jakarta 2010

Harian Fajar, 21 Oktober 2009,. Peraturan Terkait Tanah Adat

Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba

Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Sulawesi Selatan

www.pengertian.pakar.com/2015/02/pengertian-hukum-adat-dan-sistem-hukum.html. diakses pada tanggal 13 november 2015, pukul 19.51 wita

[www.http.hukum-dan-umum.blogspot.co.id/2012/04/makalah-sumber-dan-asas-hukum-adat.html](http://http.hukum-dan-umum.blogspot.co.id/2012/04/makalah-sumber-dan-asas-hukum-adat.html).

LAMPIRAN





